

KURIKULUM SEBAGAI DASAR PEDOMAN: ANALISIS PERBEDAAN KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA DALAM SATU KESATUAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Agus Rustamana¹, Mala Yanwi Humaira², Kaysa Nurauliya Saffanah³, Yolanda Kristi Febriana⁴, Faidatul Maisah⁵, Faturrahman⁶

^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

agus.rustamana@untirta.ac.id, 2288240051@student.untirta.ac.id, 2288240040@student.untirta.ac.id,
2288240039@student.untirta.ac.id, 2288240046@student.untirta.ac.id,
2288240053@student.untirta.ac.id

Abstrak

Kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan mengkaji kurikulum sebagai pedoman dasar pendidikan nasional serta menganalisis perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 (K-13) dengan Kurikulum Merdeka dalam kerangka kesatuan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Menggunakan pendekatan studi kepustakaan kualitatif, artikel ini mensintesis sumber-sumber teoretis dan empiris untuk membangun pemahaman komprehensif tentang evolusi kurikulum di Indonesia sejak 1947 hingga masa kini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meski K-13 dan Kurikulum Merdeka sama-sama bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, keduanya berbeda secara signifikan dalam pendekatan pedagogis, desain asesmen, organisasi struktural, dan otonomi guru. K-13 dicirikan oleh pendekatan saintifik terpadu dan sistem asesmen autentik yang kompleks, sementara Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas berbasis fase dan pembelajaran berorientasi proyek. Artikel ini berargumen bahwa transisi antara kedua kurikulum tersebut bukan merupakan perubahan yang radikal, melainkan penyempurnaan evolusioner dari reformasi pendidikan Indonesia yang berkelanjutan, yang dibentuk oleh tuntutan kompetensi global, kebutuhan masyarakat, dan pelajaran dari implementasi sebelumnya. Temuan ini berkontribusi untuk mengisi gap penelitian mengenai analisis komparatif kedua kurikulum yang dipandang melalui lensa tujuan pendidikan nasional, serta memberikan rekomendasi bagi penelitian empiris selanjutnya tentang hasil implementasi Kurikulum Merdeka.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Tujuan Pendidikan Nasional, Pengembangan Kurikulum, Kompetensi Abad 21

Abstract

The curriculum is a fundamental component in the education system that functions as a guideline for the implementation of learning. This research aims to examine the curriculum as a basic guideline for national education and analyze the fundamental differences between the 2013 Curriculum (K-13) and the Independent Curriculum within the framework of the unity of Indonesia's national education

Article History

Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagiarism Checker No 2634

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

goals. Using a qualitative literature study approach, this article synthesizes theoretical and empirical sources to build a comprehensive understanding of the evolution of the curriculum in Indonesia from 1947 to the present. The results of the study show that although K-13 and the Independent Curriculum both aim to produce competent graduates with character according to Pancasila values, they differ significantly in pedagogical approaches, assessment design, structural organization, and teacher autonomy. K-13 is characterized by an integrated scientific approach and a complex authentic assessment system, while the Independent Curriculum offers phase-based flexibility and project-oriented learning. This article argues that the transition between the two curricula is not a radical change, but rather an evolutionary refinement of Indonesia's ongoing education reforms, shaped by the demands of global competence, societal needs, and lessons learned from previous implementations. These findings contribute to filling the research gap regarding the comparative analysis of the two curriculums viewed through the lens of national education goals, as well as providing recommendations for further empirical research on the results of the implementation of the Independent Curriculum.

Keywords: Curriculum 2013, Independent Curriculum, National Education Goals, Curriculum Development, 21st Century Competencies

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum adalah jantung dari sebuah sistem pendidikan. Ia bukan sekadar dokumen atau daftar mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik, melainkan sebuah sistem rencana menyeluruh yang mencakup tujuan, isi, pengalaman belajar, dan mekanisme evaluasi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai cita-cita pendidikan nasional (Hamalik, 2013). Dalam konteks Indonesia, kurikulum memiliki dimensi yang sangat kaya, ia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pembelajaran, tetapi juga sebagai cermin dari nilai-nilai kebangsaan, ideologi negara, dan visi masyarakat tentang generasi penerus yang ingin mereka bentuk.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai transformasi kurikulum yang signifikan. Mulai dari Rencana Pelajaran 1947 yang berorientasi pada pembangunan identitas bangsa, hingga lahirnya Kurikulum Merdeka di era kontemporer yang mengedepankan otonomi, kreativitas, dan penguatan karakter berbasis Profil Pelajar Pancasila. Setiap pergantian kurikulum selalu dilatarbelakangi oleh perubahan sosial, tuntutan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta evaluasi kritis terhadap kurikulum sebelumnya (Ornstein & Hunkins, 2018). Dua kurikulum yang paling relevan dan banyak diperbincangkan dalam diskursus pendidikan Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 dirancang untuk mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendekatan saintifik yang terstruktur (Kemendikbud, 2013). Sementara itu, Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons atas berbagai keterbatasan implementasi K-13, dengan menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik (Yamin & Syahrir, 2022).

Perubahan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka menjadi salah satu transformasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, kurikulum untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan perlu dikembangkan melalui prinsip diversifikasi menurut satuan pendidikan, potensi daerah, serta peserta didik. Hal ini menegaskan bahwa kurikulum tidak boleh bersifat kaku dan seragam, melainkan harus mampu mengakomodasi keragaman potensi dan kebutuhan peserta didik di berbagai konteks. Namun demikian, meskipun keduanya tampak berbeda secara struktural dan pedagogis, ada satu benang merah yang menyatukan keduanya yaitu keduanya lahir dari semangat yang sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Permasalahan yang mendasari kajian ini adalah bahwa meskipun kurikulum terus mengalami perubahan, belum banyak kajian yang secara komprehensif menganalisis kedudukan kurikulum sebagai dasar pedoman serta perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam perspektif satu kesatuan tujuan pendidikan. Banyak pendidik dan pemangku kepentingan yang masih memandang perubahan kurikulum sekadar sebagai pergantian dokumen administratif, bukan sebagai transformasi paradigma pendidikan yang memiliki implikasi mendalam terhadap praktik pengajaran di kelas. Padahal, setiap perubahan kurikulum membawa konsekuensi filosofis, pedagogis, dan operasional yang perlu dipahami secara holistik. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan komparatif yang bersifat holistik dan berbasis sintesis teoritis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menggali kedudukan kurikulum sebagai dasar pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan kurikulum; (3) menganalisis perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka; serta (4) menemukan titik sinergis antara kedua kurikulum dalam kerangka tujuan pendidikan nasional yang utuh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam bagi pendidik, pemangku kebijakan, dan akademisi dalam memaknai transformasi kurikulum sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Kurikulum Sebagai Pedoman Pendidikan Nasional

Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Latin *curriculum* yang berarti “jarak yang harus dilalui dalam sebuah lomba.” Dalam dunia pendidikan, istilah ini kemudian dipahami sebagai lintasan yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan tertentu. Secara hukum, definisi kurikulum di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (19), yang menjelaskan bahwa kurikulum adalah satu rangkaian perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, materi, dan isi pelajaran serta metode yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan suatu sistem yang terintegrasi dan berfungsi sebagai pedoman komprehensif.

Kajian tentang kurikulum dalam dunia pendidikan telah berlangsung selama beberapa dekade. Ralph W. Tyler (1949) dalam karyanya menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum harus menjawab empat pertanyaan fundamental yaitu apa tujuan pendidikan yang hendak dicapai, pengalaman belajar apa yang harus diberikan, bagaimana pengalaman tersebut diorganisasikan, serta bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Kurikulum adalah suatu perencanaan pembelajaran yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan pengalaman belajar yang teratur dan dicek secara rapi. Model Tyler ini menjadi fondasi bagi hampir seluruh teori pengembangan kurikulum modern, termasuk yang diterapkan di Indonesia.

Sementara itu, Hilda Taba (1962) menganggap kurikulum sebagai sebuah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa. Dalam pandangannya yang lebih holistic ini, ia memandang kurikulum sebagai sebuah proses yang terus berkembang, bukan sekadar produk akhir. Pandangan ini relevan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran (Suryaman, 2020). Oemar Hamalik (2007) menjelaskan bahwa kurikulum adalah program pendidikan yang disusun oleh lembaga pendidikan untuk siswa, yang mencakup tujuan, materi pembelajaran, cara mengajar, serta cara menguji hasil belajar sebagai satu rangkaian sistem yang utuh. Ketiga pakar ini sepakat bahwa kurikulum memiliki fungsi esensial sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh proses pendidikan.

Dalam penelitiannya Faiz dan Kurniawaty (2022) menyatakan bahwa transformasi menuju Kurikulum Merdeka merupakan respons strategis terhadap berbagai tantangan pembelajaran abad ke-21, termasuk kebutuhan akan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sementara itu, Putra dan Dewi (2021) dalam evaluasi mereka terhadap Kurikulum 2013 menemukan bahwa meskipun K-13 berhasil mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran, kompleksitas sistem penilaiannya menjadi hambatan utama bagi sebagian besar guru, terutama di daerah terpencil.

Secara konseptual, kurikulum dapat dipahami melalui beberapa pendekatan. Pertama, kurikulum sebagai rencana, yaitu dokumen perencanaan yang mencakup tujuan, materi, cara belajar, serta cara mengukur hasil pembelajaran. Kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, yang tidak hanya berupa dokumen tertulis tetapi juga meliputi seluruh pengalaman belajar siswa yang diurus oleh sekolah, termasuk kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, interaksi sosial, dan budaya sekolah. Ketiga, kurikulum sebagai sistem, yang terdiri dari beberapa komponen saling terkait, yaitu tujuan pendidikan, isi atau materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi. Keempat komponen ini harus bekerja sama secara sinergis agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal.

Teori Pengembangan dan Perubahan Kurikulum

Pengembangan kurikulum harus bersifat dinamis karena pendidikan selalu berhadapan dengan perubahan masyarakat. Tyler dalam model rasionalnya menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus menjawab empat pertanyaan pokok: tujuan pendidikan, pengalaman belajar, organisasi pengalaman, dan evaluasi. Prinsip pengembangan kurikulum meliputi relevansi (sesuai kebutuhan masyarakat dan peserta didik), fleksibilitas (dapat menyesuaikan kondisi lokal), kontinuitas (berkesinambungan antar jenjang pendidikan), serta efektivitas dan efisiensi (mencapai tujuan secara optimal).

Perubahan kurikulum merupakan konsekuensi dari perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Print (1993) menjelaskan bahwa kurikulum harus selalu direvisi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman, karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat yang terus berubah. Di Indonesia, perubahan kurikulum juga dipengaruhi oleh tuntutan kompetensi abad ke-21, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Faiz dan Kurniawaty (2022) menyatakan bahwa transformasi menuju Kurikulum Merdeka bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan tantangan global. Dengan demikian, perubahan kurikulum bukanlah fenomena yang sporadis, melainkan merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan sebagai respons terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik

Paradigma pendidikan modern menggeser pembelajaran dari *teacher-centered learning* menuju *student-centered learning*. Menurut Suryaman (2020), Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang memberi ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui proyek, refleksi, dan pengalaman nyata. Pendekatan konstruktivistik ini memandang

bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan, bukan sekadar ditransfer oleh guru. Pergeseran ini memiliki implikasi signifikan terhadap peran guru, yang berubah dari penguasa tunggal pengetahuan menjadi fasilitator dan mediator pembelajaran.

Dalam konteks perbandingan Kurtilas dan Kurmer, pergeseran paradigma ini menjadi salah satu pembeda paling mendasar. Kurikulum 2013 telah mulai mengakomodasi pendekatan berpusat pada peserta didik melalui pendekatan saintifik, namun implementasinya masih cenderung bersifat terstruktur dan seragam. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka menawarkan ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk menentukan jalur belajar mereka sendiri melalui proyek-proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis fase yang lebih fleksibel dan kontekstual.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen kebijakan pendidikan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kurikulum. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis guna membangun pemahaman teoretis. Metode ini dipilih karena kajian mengenai kurikulum lebih menekankan pada analisis konsep, kebijakan, dan perkembangan pemikiran pendidikan yang memerlukan kedalaman teoretis.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi: (1) mengidentifikasi masalah dan fokus kajian, yaitu kedudukan kurikulum sebagai pedoman dan perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka; (2) mengumpulkan literatur yang relevan dari jurnal terakreditasi, buku referensi, dan dokumen kebijakan resmi Kementerian Pendidikan; (3) mengkaji serta membandingkan berbagai teori dan hasil penelitian terkait pengembangan kurikulum di Indonesia; (4) menganalisis secara kritis temuan-temuan literatur untuk menjawab rumusan masalah; dan (5) menarik sintesis konklusif berdasarkan bukti-bukti empiris dan teoretis yang terkumpul. Dengan pendekatan ini, penulis dapat memahami perubahan kurikulum secara historis, filosofis, dan pedagogis dalam satu kerangka analisis yang utuh dan komprehensif.

Data yang dikumpulkan bersifat data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen kurikulum resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, artikel jurnal ilmiah yang terindeks, serta buku-buku referensi tentang pengembangan kurikulum. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis isi dari setiap sumber literatur secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola perbedaan, dan kesamaan mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

PEMBAHASAN

Kurikulum sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam ranah pendidikan, makna kurikulum ini kemudian berkembang menjadi 'lintasan belajar' yang harus ditempuh peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (19), mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sebagai pedoman, kurikulum tidak hanya memberikan arah tentang apa yang harus diajarkan, tetapi juga bagaimana mengajarkannya dan bagaimana menilai hasilnya. Nasution (2015) menekankan bahwa

kurikulum merupakan rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Dengan demikian, kurikulum memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan sebagai sarana pengembangan potensi peserta didik.

Kedudukan kurikulum sebagai pedoman menjadi semakin penting dalam konteks pendidikan Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan budaya yang tinggi. Kurikulum yang baik harus mampu memberikan pedoman yang jelas sekaligus fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan di berbagai konteks tanpa kehilangan esensi tujuan pendidikannya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mendasar mengapa kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan bukan karena ketidakstabilan kebijakan, melainkan karena upaya untuk menemukan keseimbangan antara kejelasan pedoman dan fleksibilitas implementasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum merupakan proses penyesuaian sistem pendidikan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika dunia pendidikan. Kurikulum tidak bersifat statis, tetapi berubah secara berkala untuk mempertahankan relevansi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politis. Tilaar (2002) menggarisbawahi bahwa setiap perubahan kurikulum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan ideologis yang melingkupinya. Sejak Rencana Pelajaran 1947, Indonesia telah mengalami setidaknya sepuluh kali perubahan kurikulum, masing-masing membawa filosofi dan pendekatan yang berbeda namun tetap berakar pada semangat kebangsaan dan Pancasila.

Periode awal kemerdekaan (1947-1964) ditandai oleh orientasi kurikulum pada pembangunan identitas nasional dan pengembangan karakter kebangsaan. Kurikulum 1952 kemudian memperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Konsep Pancawardhana pada tahun 1964 menandai langkah maju menuju pendekatan yang lebih komprehensif, dengan mengintegrasikan pengembangan moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan fisik secara bersamaan (Hamalik, 2007). Era Orde Baru (1968-1994) membawa kurikulum yang sarat muatan ideologi Pancasila dan stabilitas nasional. Kurikulum 1975 memperkenalkan pendekatan sistem instruksional yang terpengaruh teori behavioristik, sementara Kurikulum 1984 mencoba mengaktifkan peran peserta didik melalui pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Meski inovatif dalam konsep, implementasinya sering terhambat oleh budaya pembelajaran yang masih bersifat teacher-centered (Tilaar, 2002).

Era Reformasi membawa angin segar dengan hadirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 yang kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. KTSP memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal mereka sebuah terobosan desentralisasi pendidikan yang signifikan (Sanjaya, 2008). Puncak dari evolusi ini adalah hadirnya Kurikulum 2013 dan kemudian Kurikulum Merdeka. Berikut adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia:

Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan dalam bidang IPTEK mendorong kebutuhan penyesuaian kurikulum agar peserta didik memperoleh kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman. Teknologi baru mengubah cara belajar dan bekerja sehingga materi dan metode pembelajaran perlu direvisi. Suyanto (2013) menegaskan bahwa revolusi teknologi informasi menuntut kurikulum yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi digital bagi peserta didik. Perkembangan teknologi juga mengubah modalitas pembelajaran, dari yang semula bersifat tatap muka konvensional menjadi pembelajaran berbasis digital yang memerlukan kompetensi baru dari sisi pendidik maupun peserta didik.

Kedua, perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kurikulum harus responsif terhadap harapan masyarakat terhadap kompetensi yang diharapkan dari lulusan pendidikan. Perubahan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat akan memengaruhi arah pendidikan dan tujuan kurikulum. Wibawa dan Nasution (2020) menyatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas mengarah pada perubahan kurikulum yang lebih menekankan kompetensi abad ke-21. Masyarakat modern mengharapkan lulusan yang tidak hanya menguasai pengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang memadai.

Ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Perubahan kebijakan pendidikan oleh pemerintah merupakan faktor penting yang mengarah pada reformasi kurikulum. Latief (2020) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah sebagai pengendali sistem pendidikan akan mendorong revisi kurikulum untuk memenuhi standar nasional pendidikan, termasuk pemenuhan undang-undang pendidikan dan model asesmen. Kebijakan ini sering kali menjadi katalisator utama perubahan kurikulum, meskipun idealnya kebijakan hendaknya lahir dari kajian mendalam terhadap kebutuhan lapangan.

Keempat, kritik terhadap kurikulum sebelumnya. Seringkali perubahan kurikulum terjadi karena evaluasi terhadap implementasi kurikulum sebelumnya menunjukkan kelemahan tertentu, baik dalam pencapaian tujuan, relevansi isi, maupun efektivitas metode pembelajaran. Putra dan Dewi (2021) menemukan bahwa kritik terhadap Kurikulum 2013 berkaitan dengan kesulitan guru dalam implementasi pedagogi dan asesmen autentik, yang mendorong revisi untuk memperbaiki instrumen pembelajaran dan penilaian. Kritik konstruktif ini menjadi umpan balik penting bagi pengembangan kurikulum yang lebih baik.

Kelima, globalisasi pendidikan. Arus globalisasi memberi tekanan pada sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif secara global. Yuliani dan Hasibuan (2022) menekankan bahwa integrasi kompetensi global seperti literasi budaya, keterampilan sosial, dan kemampuan bahasa asing menjadi bagian dari landasan perubahan kurikulum di era global. Globalisasi juga membawa standar-standar internasional yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum nasional.

Keenam, perubahan sosial dan budaya. Perubahan struktur sosial dan dinamika budaya, termasuk pergeseran nilai kehidupan masyarakat, memengaruhi konten kurikulum. Mutmainah (2019) menunjukkan bahwa perubahan norma sosial di masyarakat urban memengaruhi kurikulum untuk memasukkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan etika digital. Perubahan ini mencerminkan bahwa kurikulum harus terus menyesuaikan diri dengan konteks budaya yang berkembang.

Perbedaan Mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Perbedaan antara Kurikulum 2013 (Kurtilas) dan Kurikulum Merdeka (Kurmer) dapat diidentifikasi melalui beberapa dimensi kunci yang saling berkaitan.

Dimensi	Kurikulum 2013 (Kurtilas)	Kurikulum Merdeka (Kurmer)
Paradigma	Berbasis konten dan kompetensi terstruktur	Berbasis kompetensi fleksibel dan berpusat pada peserta didik
Pendekatan Pedagogi	Pendekatan saintifik (5M: mengamati, menanyakan, mencoba, menganalisis, mengkomunikasikan)	Pendekatan diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan eksplorasi

Struktur Kurikulum	Berbasis mata pelajaran per kelas	Berbasis fase (A-F) yang menyesuaikan perkembangan peserta didik
Otonomi Guru	Terbatas; guru mengikuti silabus dan RPP yang terstandar	Luas; guru merancang modul ajar sesuai konteks peserta didik
Sistem Asesmen	Penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester dengan rubrik autentik	Asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dengan fleksibilitas pelaporan
Profil Pelajar	Belum terintegrasi secara eksplisit	Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai program intrakurikuler
Muatan Pembelajaran	Padat dan terstruktur per mata pelajaran	Fokus pada materi esensial; pengurangan muatan agar lebih mendalam
Peran Guru	Pelaksana kurikulum	Perancang dan fasilitator pembelajaran

Tabel 1 Perbandingan Kurikulum

Sumber: Diadaptasi dari Kemendikbud (2013), Yamin & Syahrir (2022), Faiz & Kurniawaty (2022)

Kurikulum 2013 dirancang untuk menjawab tantangan global dan kebutuhan kompetensi di abad ke-21 dengan menjadikan pendekatan saintifik sebagai dasar utama pembelajaran. Menurut Kemendikbud (2013), Kurikulum 2013 bertujuan mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam satu kesatuan pembelajaran yang komprehensif. Pendidikan karakter menjadi fokus utama melalui penguatan nilai-nilai Pancasila. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum 2013 menghadapi kendala signifikan, terutama dalam hal administrasi penilaian yang rumit dan kesiapan guru dalam menggunakan pendekatan ilmiah. Kompleksitas administratif ini sering kali mengurangi waktu dan energi guru yang seharusnya difokuskan pada proses pembelajaran itu sendiri.

Sebagai respons korektif dan inovatif, Kurikulum Merdeka hadir mengusung paradigma desentralisasi pembelajaran. Yamin dan Syahrir (2022) menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi guru kebebasan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Struktur kurikulum yang berbasis fase, Perbandingan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan teradaptasi, dimana peserta didik dikelompokkan berdasarkan tahapan perkembangan kognitif dan psikologis, bukan semata-mata berdasarkan tahun ajaran. Pendekatan ini memberikan ruang bagi diferensiasi pembelajaran yang lebih bermakna dan responsif terhadap keragaman kemampuan peserta didik dalam satu kelompok.

Perbedaan paling signifikan terletak pada otonomi pendidik. Dalam Kurikulum 2013, guru bertindak sebagai pelaksana kurikulum yang harus mengikuti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan secara terstandar. Sebaliknya, dalam Kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan untuk merancang modul ajar yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di lingkungannya masing-masing. Pergeseran ini dari *teacher as curriculum implementer* menuju *teacher as curriculum developer* merupakan lompatan paradigmatic yang memerlukan perubahan mindset dan kompetensi pedagogic yang mendalam dari para pendidik.

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam Kesatuan Tujuan Pendidikan Nasional

Meskipun Kurtilas dan Kurmer memiliki perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan implementasi, keduanya sesungguhnya bernaung dalam satu kesatuan tujuan pendidikan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik. Tujuan ini tercermin dalam pasal-pasal UU Sisdiknas yang menjadi landasan hukum bagi setiap kurikulum yang berlaku di Indonesia.

Kurikulum 2013 menempuh jalur terstruktur dan terstandar, dengan keyakinan bahwa keseragaman pendekatan akan menjamin pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pendekatan saintifik 5M dipandang sebagai metode universal yang dapat diterapkan di berbagai konteks pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, keseragaman ini justru menjadi kendala ketika berhadapan dengan keragaman kondisi sekolah, kemampuan guru, dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda di setiap daerah. Guru sering kali merasa terbebani dengan tuntutan administratif yang menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk inovasi pedagogi. Kurikulum Merdeka menempuh jalur yang lebih fleksibel dan kontekstual, dengan keyakinan bahwa otonomi pendidik dan diferensiasi pembelajaran akan menghasilkan pendidikan yang lebih relevan dan bermakna bagi setiap peserta didik. Kebebasan yang diberikan kepada guru untuk merancang modul ajar sesuai konteks lokal diharapkan mampu mengatasi kesenjangan antara standar nasional dan realitas di lapangan.

Dalam perspektif ini, pergeseran dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dapat dipahami sebagai proses *refinement* (penyempurnaan), bukan *replacement* (penggantian total). Kurikulum 2013 telah meletakkan fondasi penting berupa integrasi kompetensi dan pendidikan karakter dalam kurikulum nasional, sementara Kurikulum Merdeka menyempurnakan fondasi tersebut dengan menambahkan dimensi fleksibilitas, otonomi, dan kontekstualisasi. Keduanya merupakan bagian dari evolusi pendidikan Indonesia yang bergerak menuju sistem pendidikan yang semakin matang, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Praktik pengajaran yang berbeda antara kedua kurikulum ini pada hakikatnya merepresentasikan dua tahapan dalam proses pendewasaan sistem pendidikan nasional. Tahap pertama (Kurtilas) adalah tahap standardisasi, di mana sistem pendidikan berusaha menetapkan standar minimal yang harus dicapai oleh seluruh satuan pendidikan. Tahap kedua (Kurmer) adalah tahap diferensiasi, di mana sistem pendidikan mulai mengakui dan mengakomodasi keragaman potensi dan kebutuhan peserta didik. Kedua tahapan ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena standardisasi tanpa diferensiasi akan menghasilkan pendidikan yang kaku, sementara diferensiasi tanpa standardisasi akan menghasilkan pendidikan yang tidak merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memegang peranan fundamental sebagai dasar pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sistem terintegrasi yang mencakup tujuan, pengalaman belajar, metode, dan evaluasi yang dirancang secara sistematis untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Transformasi kurikulum merupakan keniscayaan yang didorong oleh determinan multidimensi, di antaranya perkembangan IPTEK, dinamika sosiokultural, arus globalisasi, dan reorientasi kebijakan regulatif. Perbedaan mendasar antara Kurtilas dan Kurmer terletak pada pendekatan pedagogi, struktur kurikulum, otonomi pendidik, dan sistem asesmen. Kurtilas menekankan pendekatan saintifik yang terstruktur dan seragam, sementara Kurmer mengusung paradigma fleksibilitas melalui pembelajaran berbasis fase, diferensiasi, dan otonomi guru. Meskipun demikian, kedua kurikulum tersebut bernaung dalam satu kesatuan tujuan pendidikan yang sama, yaitu mengembangkan kompetensi peserta didik secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Perbedaan praktik pengajaran antara keduanya merepresentasikan evolusi pendidikan Indonesia dari tahap standarisasi menuju tahap diferensiasi. Perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka bukanlah penggantian semata, melainkan proses penyempurnaan yang membangun di atas fondasi yang telah diletakkan oleh kurikulum sebelumnya. Pemahaman ini penting agar pendidik dan pemangku kebijakan tidak memandang perubahan kurikulum sebagai sesuatu yang bersifat fragmentatif, melainkan sebagai proses yang berkelanjutan dan saling melengkapi dalam upaya mewujudkan pendidikan yang lebih bermartabat bagi seluruh anak bangsa.

REKOMENDASI

Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan dan berbasis data terhadap implementasi Kurikulum Merdeka, dengan memperhatikan secara khusus kesenjangan kesiapan antar wilayah dan antar jenis sekolah. Kebijakan pendampingan dan pelatihan guru harus diperkuat dan diperluas jangkauannya. Bagi para pendidik, Kurikulum Merdeka hendaknya dipahami bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengekspresikan profesionalisme dan kreativitas dalam merancang pembelajaran yang benar-benar bermakna bagi peserta didik. Kebebasan yang diberikan Kurikulum Merdeka adalah kepercayaan yang harus dijawab dengan komitmen dan kompetensi.

Bagi peneliti selanjutnya, sangat direkomendasikan untuk melakukan penelitian empiris longitudinal yang mengikuti perkembangan peserta didik yang dididik dengan Kurikulum Merdeka dari tingkat dasar hingga menengah, guna mengukur dampak jangka panjangnya terhadap karakter, kompetensi, dan kesiapan mereka memasuki kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan mixed methods yang mengombinasikan analisis kuantitatif terhadap data hasil belajar peserta didik dengan kajian kualitatif mendalam terhadap pengalaman guru dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Studi komparatif antar wilayah dan antar jenis sekolah juga sangat diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2022). Urgensi kurikulum merdeka dalam mengembangkan karakter peserta didik. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6611-6618.
- Hamalik, O. (2007). *Manajemen pengembangan kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, O. (2013). *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kemendikbud. (2013). *Dokumen kurikulum 2013*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2013). *Dokumen kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latief, M. A. (2020). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik* (Cet. ke-2). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum berbasis kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutmainah, M. (2019). Pengaruh perubahan sosial budaya terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 175-183.
- Nasution, S. (2015). *Asas-asas kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, principles, and issues* (7th ed.). Boston: Pearson.

- Print, M. (1993). Curriculum development and design. Sydney: Allen & Unwin.
- Putra, A., & Dewi, R. (2021). Evaluasi implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 115-128.
- Putra, R., & Dewi, S. (2021). Evaluasi kurikulum 2013: Implementasi pembelajaran dan asesmen autentik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(1), 45-58.
- Sanjaya, W. (2008). Kurikulum dan pembelajaran. Jakarta: Kencana.
- Suryaman, M. (2020). Orientasi pengembangan kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 20(2), 1-12.
- Suyanto. (2013). Pengembangan kurikulum pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New York: Harcourt, Brace & World.
- Tilaar, H. A. R. (2002). Perubahan sosial dan pendidikan. Jakarta: Grasindo.
- Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wibawa, B., & Nasution, F. (2020). Kompetensi abad 21 dalam perancangan kurikulum pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kontemporer*, 4(1), 1-10.
- Yamin, M., & Syahrir. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(3), 345-356.
- Yuliani, R., & Hasibuan, A. (2022). Globalisasi dan perubahan kurikulum pendidikan dasar. *Jurnal Pendidikan Global*, 3(3), 210-224.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.